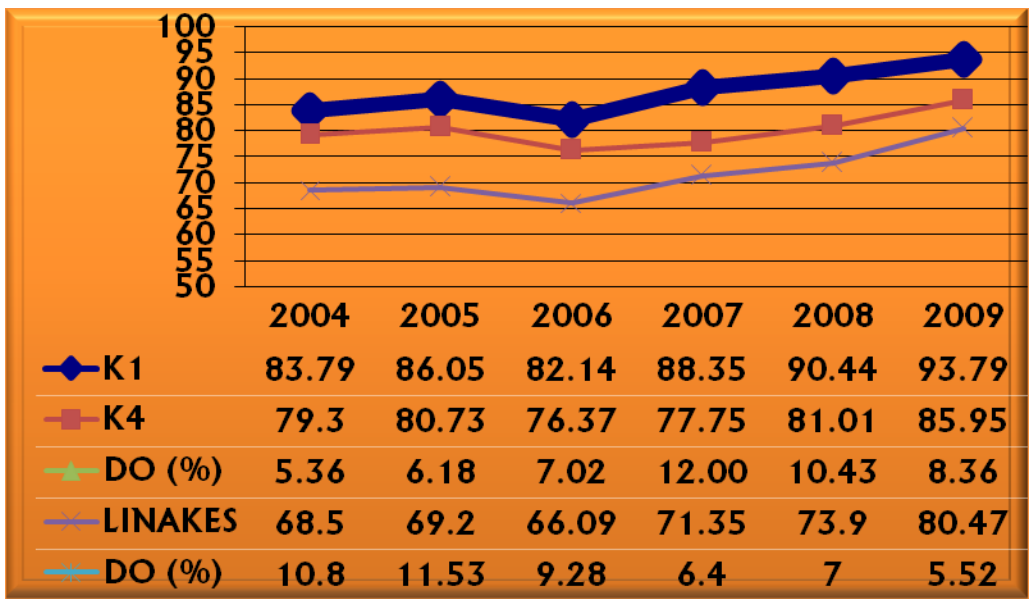


**PENGEMBANGAN
SISTEM AKREDITASI PELAYANAN
PERSALINAN UNTUK RS, PUSKESMAS
DAN RUMAH BERSALIN DI
PROVINSI JAWA BARAT**

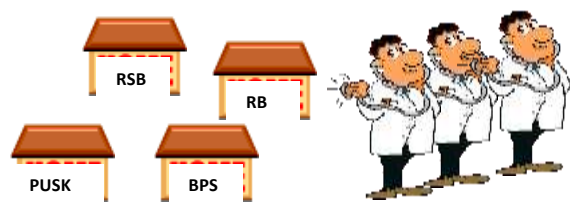
**DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT
BIDANG REGULASI DAN KEBIJAKAN
KESEHATAN**

**Family welfare program functions :
Community empowerment**

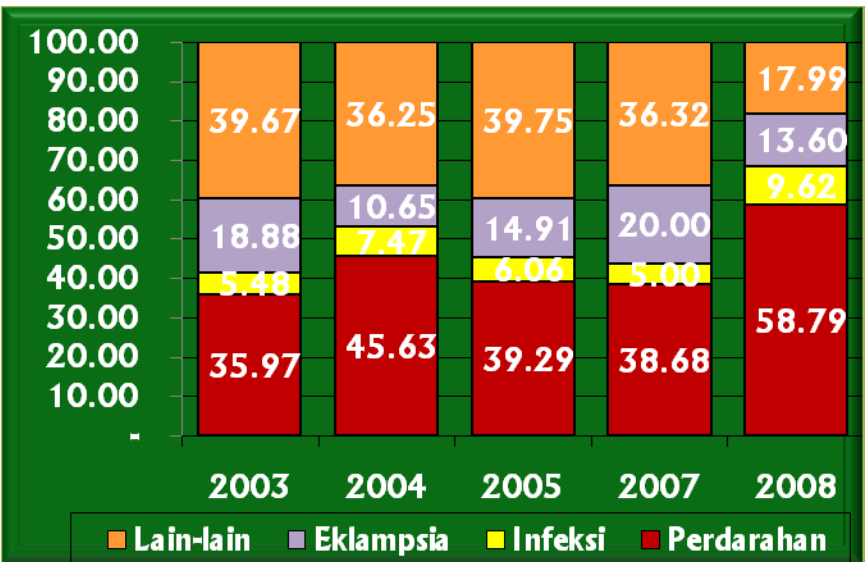
KADER



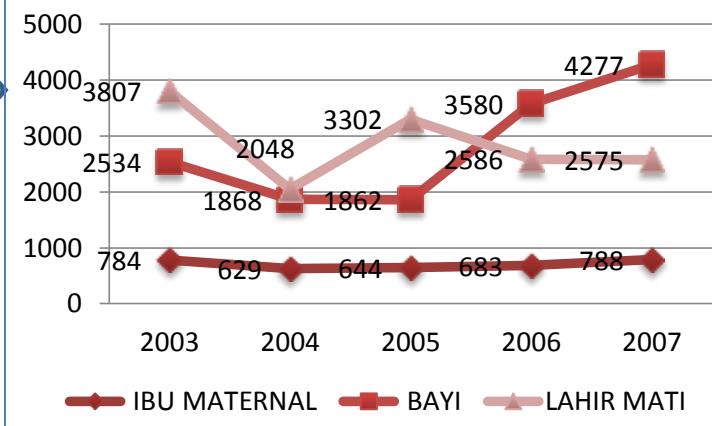
Public Health Functions :
Quality Improvement Health
Facilities and manpower through
accreditation and certification



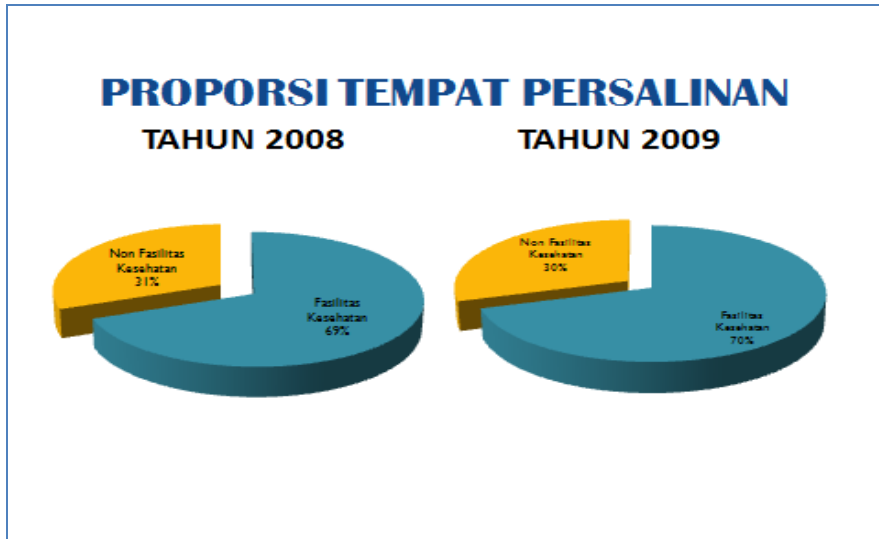
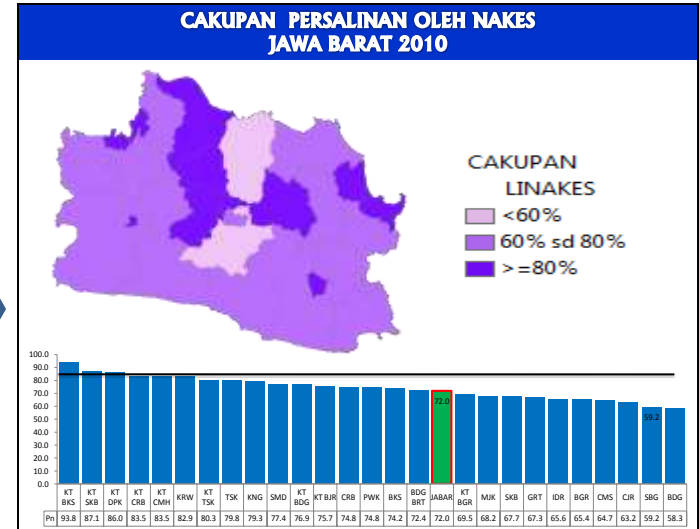
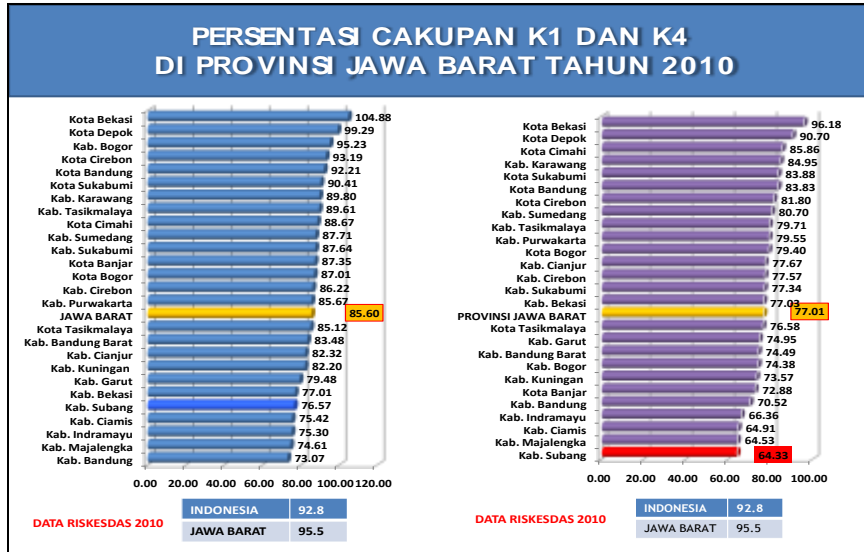
Service is not optimal



Jumlah Kematian Ibu Maternal, Bayi dan lahir mati

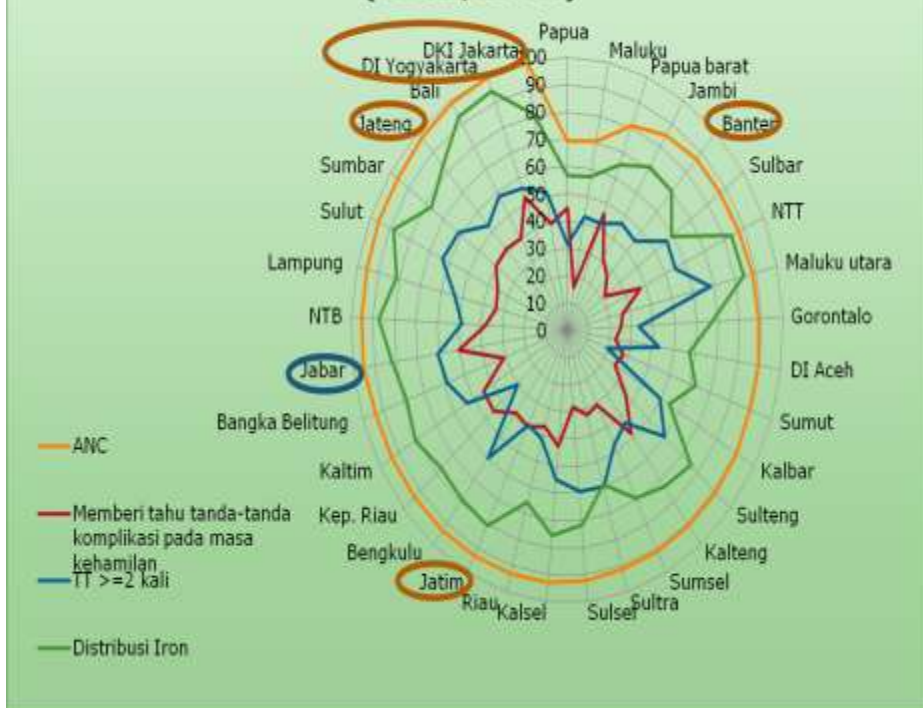


PERSALINAN DI FASKES ↑↑ SIAPKAH FASKES ???

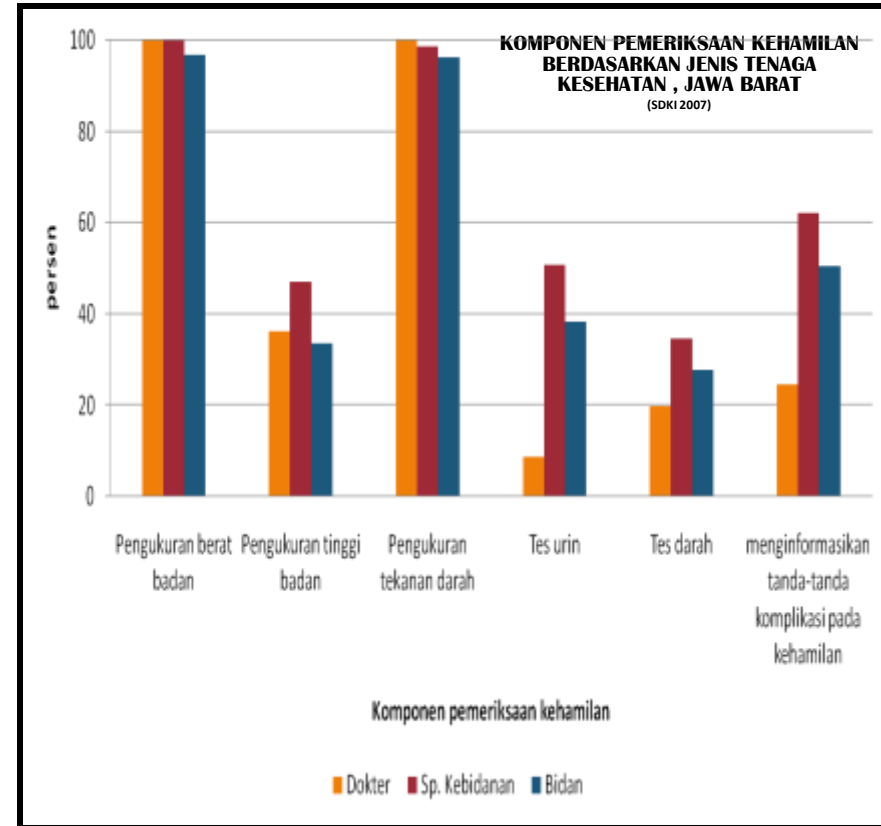


KUALITAS ANC DI JAWA BARAT

Komponen Pemeriksaan Antenatal (SDKI, 2007)



Cakupan ANC di Jawa Barat sangat bagus, namun kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dari masih rendahnya cakupan komponen pemeriksaan kehamilan yang seharusnya diterima oleh ibu



- Kualitas pelayanan pemeriksaan kehamilan oleh spesialis kebidanan pada umumnya lebih baik tetapi sebagian besar ANC dilakukan oleh bidan
- Cakupan pengukuran tinggi badan, tes urine, tes darah dan tanda komplikasi pada umumnya rendah

KUALITAS RUJUKAN DI BANDUNG BOGOR DAN CIANJUR TAHUN 2008-2009

Dirujuk ke	Bandung		Bogor		Cianjur	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Penolong kedua	59%	55%	73.5%	60%	66.7%	40%
- Bidan sebagai penolong ke dua	18.2%	25%	28.6%	22.2%	24.2%	26.7%
- Bidan sebagai Penolong ketiga	22.7%	20%	38.8%	26.7%	3%	13.3%
- Bidan sebagai Penolong ke empat	18.2%	5%	8.2%	6.7%	6.1%	20%

Panjangnya proses rujukan untuk menyelamatkan nyawa ibu bersalin tergambar dari jumlah provider yang harus ditemui oleh seorang ibu yang berakhir dengan kematiannya

KUALITAS KEMITRAAN DAN RUJUKAN DI KAB CIANJUR, BOGOR DAN BANDUNG TAHUN 2009

(AMP 2009)

Dukun tidak selalu didampingi bidan dalam menolong persalinan, ibu belum tentu berhasil dirujuk meskipun ditolong oleh bidan

- Ada 63 ibu yang ditolong oleh dukun dan meninggal dirumah, 58 diantaranya hanya ditolong dukun tanpa didampingi oleh bidan
- Ada 7 ibu yang ditolong bidan dan meninggal dirumah, 5 diantaranya tidak dirujuk

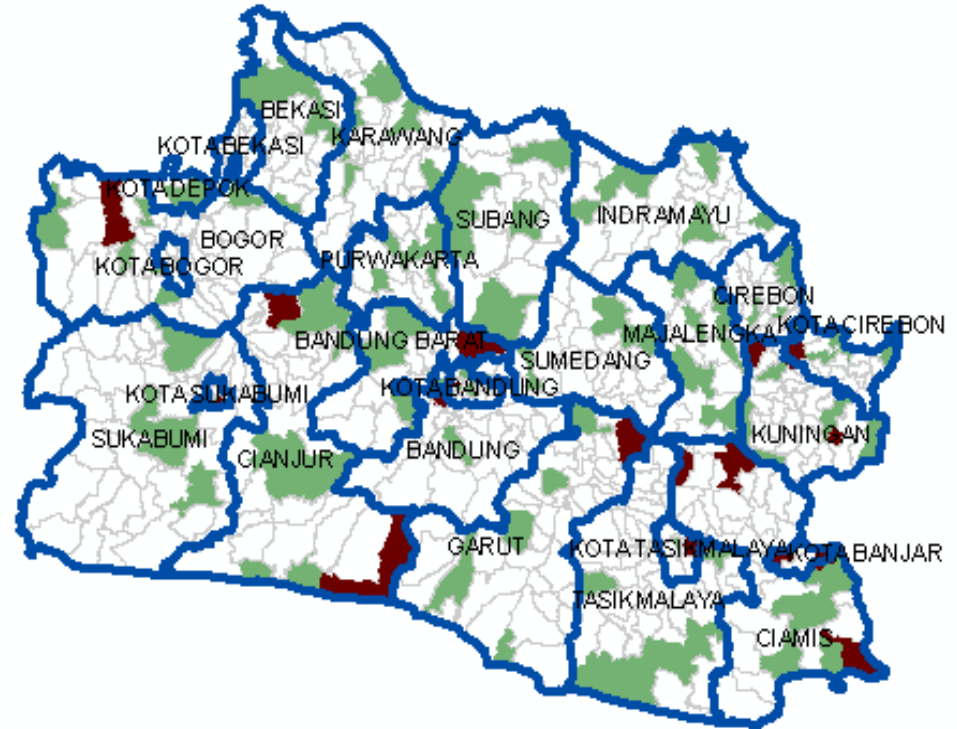
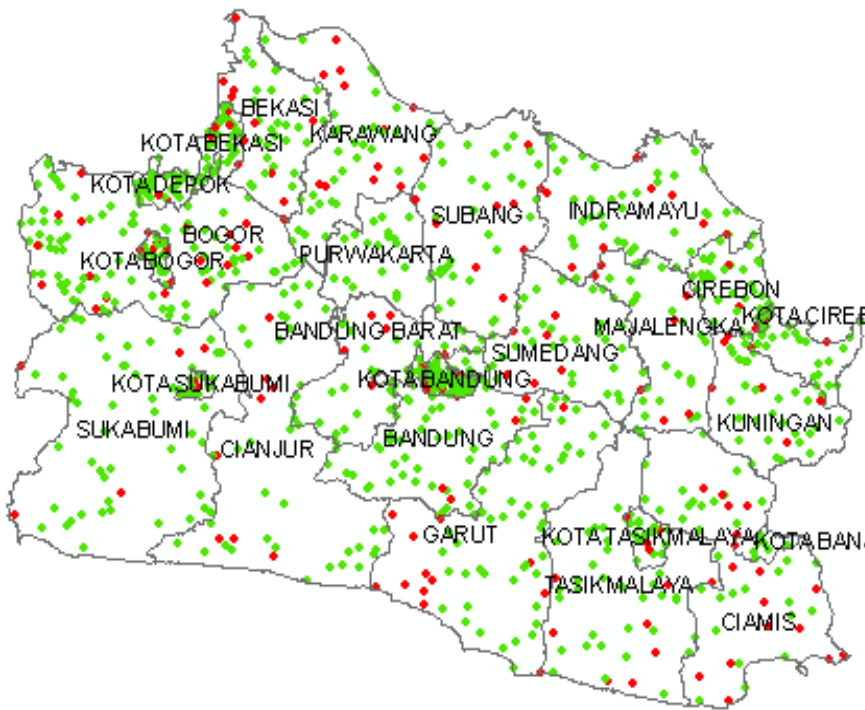
Ibu yang meninggal di RUMAH

Penolong pertama	Rujukan pertama			Total
	Rujuk ke		Tidak dirujuk	
	bidan	dokter		
Tidak ada	0	0	3	3
Dukun bayi	5	0	58	63
Bidan	0	2	5	7
Dokter	0	0	2	2
Keluarga	0	0	1	1
Total	5	2	69	76

Meninggal di RUMAH SAKIT

Penolong pertama	Rujukan pertama			Total
	Dirujuk ke		Tidak dirujuk	
	bidan	dokter		
dukun bayi	49	0	7	56
Bidan	2	42	1	45
Dokter	0	0	23	24
Keluarga	1	1	1	3
Total	52	43	32	128

SEBARAN PUSKESMAS DI JAWA BARAT TAHUN 2010



PKM TANPA RI



PKM PERAWATAN

**JUMLAH PUSKESMAS TAHUN
2010 = 1040**

**JUMLAH PUSKESMAS PONED
TAHUN 2010 = 143**



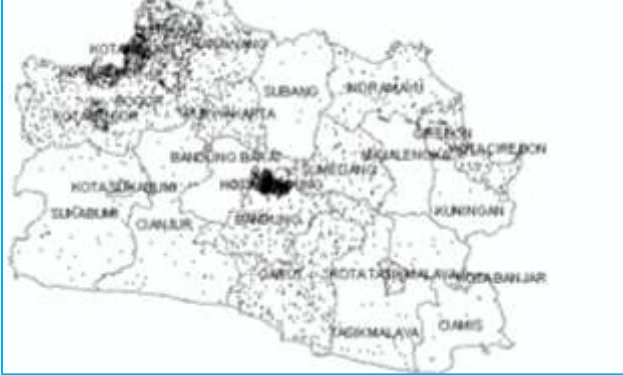
PUSKESMAS
PONED YANG
BERFUNGSI 118 BUAH



PUSKESMAS
PONED YANG
BELUM BERFUNGSI 25 BUAH

**SEBARAN PELAYANAN
KESEHATAN DASAR SWASTA DI
JAWA BARAT TAHUN 2010**

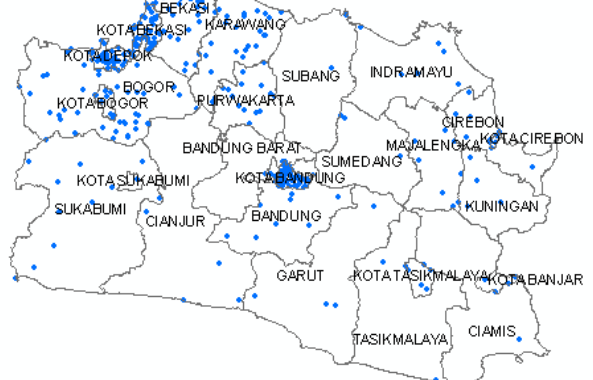
BALAI PENGOBATAN 3076 BUAH



BIDAN PRAKTEK SWASTA 6284 BUAH



RUMAH BERSALIN 336 BUAH



**URUSAN DAN SASARAN AKREDITASI
DI JAWA BARAT**

URUSAN	NAMA SARANA	JUMLAH SARANA
PROVINSI (Rekomendasi Kab/Kota)	PUSK DTP	140
	PUSK NON DTP	900
	BP	3076
	RB	336
	BPS	6284
	TOTAL SARYANDAS	10736
PUSAT (Rekomendasi Provinsi)	RS PROV	3
	RS DEPKES	5
	RSUD	34
	RS TNI POLRI	17
	RS KHUSUS	1
	RS SWASTA	179
	UTDC	23
	LAB ORATORIUM PEMERINTAH	23
	LAB ORATORIUM SWASTA	220
	LABORATORIUM CTKI	37
TOTAL SARANA RUJUKAN	542	

KERANGKA PIKIR INTERVENSI

FUNGSI PKK :

Pemberdayaan Masy



KADER



MAMPU DLM :

1. Informasi Publik
2. Identifikasi Bumil
3. Mobilisasi Bumil datang ke Sarkes

FUNGSI DINKES :

Peningkatan Kualitas Sarkes dan Tenaga melalui Akreditasi dan Sertifikasi.



MELAKUKAN :

1. MEMBENTUK TIM PEMBINA DAN TIM PENILAI AKREDITASI TK PROV UNTUK YANDAS.
2. MEMBENTUK TIM PEMBINA AKREDITASI KABUPATEN/KOTA
3. KOORDINASI DG TIM KARS DAN PENILAI AKREDITASI YANDAS
4. PEMANTAPAN PENERAPAN STANDAR AKREDITASI RS DAN YANDAS
5. MELAKUKAN PENILAIAN AKREDITASI
6. UMPAN BALIK KESENJANGAN KE KAB/KOTA
7. INTERVENSI THD KESENJANGAN OLEH KAB/KOTA

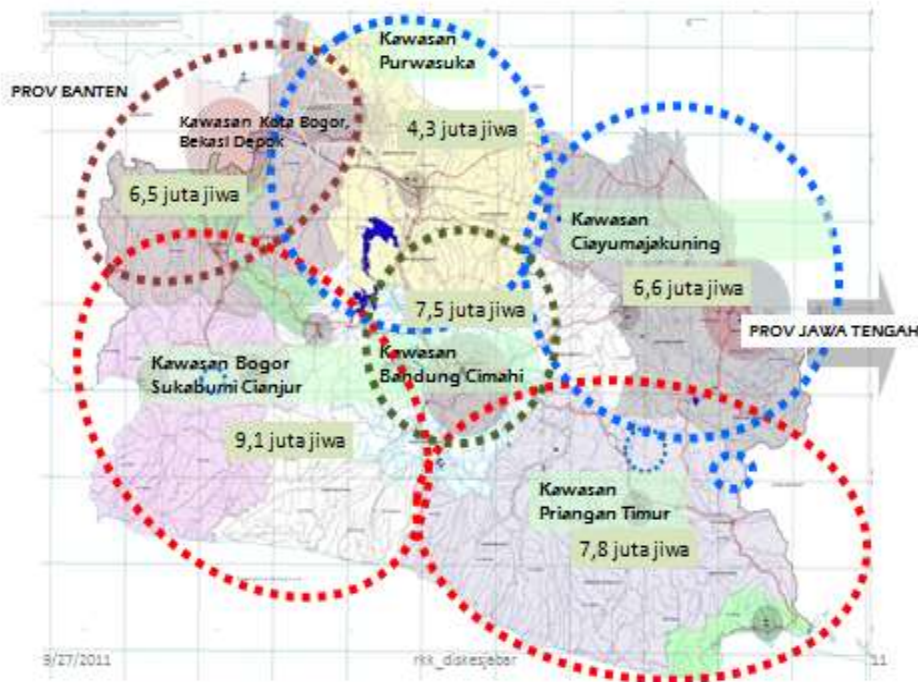


DILANJUTKAN DIURAIKAN DLM POA

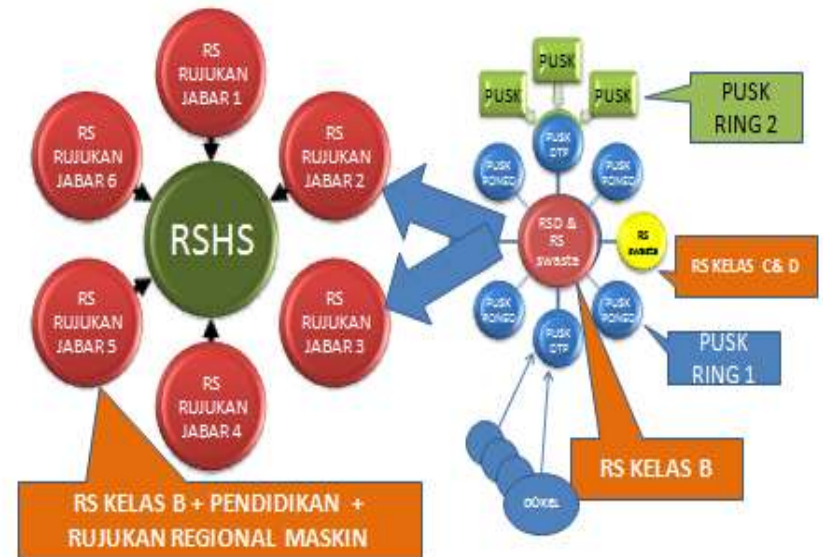
- a. Membina dan Menilai akreditasi
- b. Menilai Penerapan Standar
- c. Menyusun Intervensi
- d. Membentuk Koordinator → Tim.
- e. Membuat Peta sasaran
- f. Melakukan intervensi

SISTEM RUJUKAN YANG BERJENJANG DAN TERSTRUKTUR

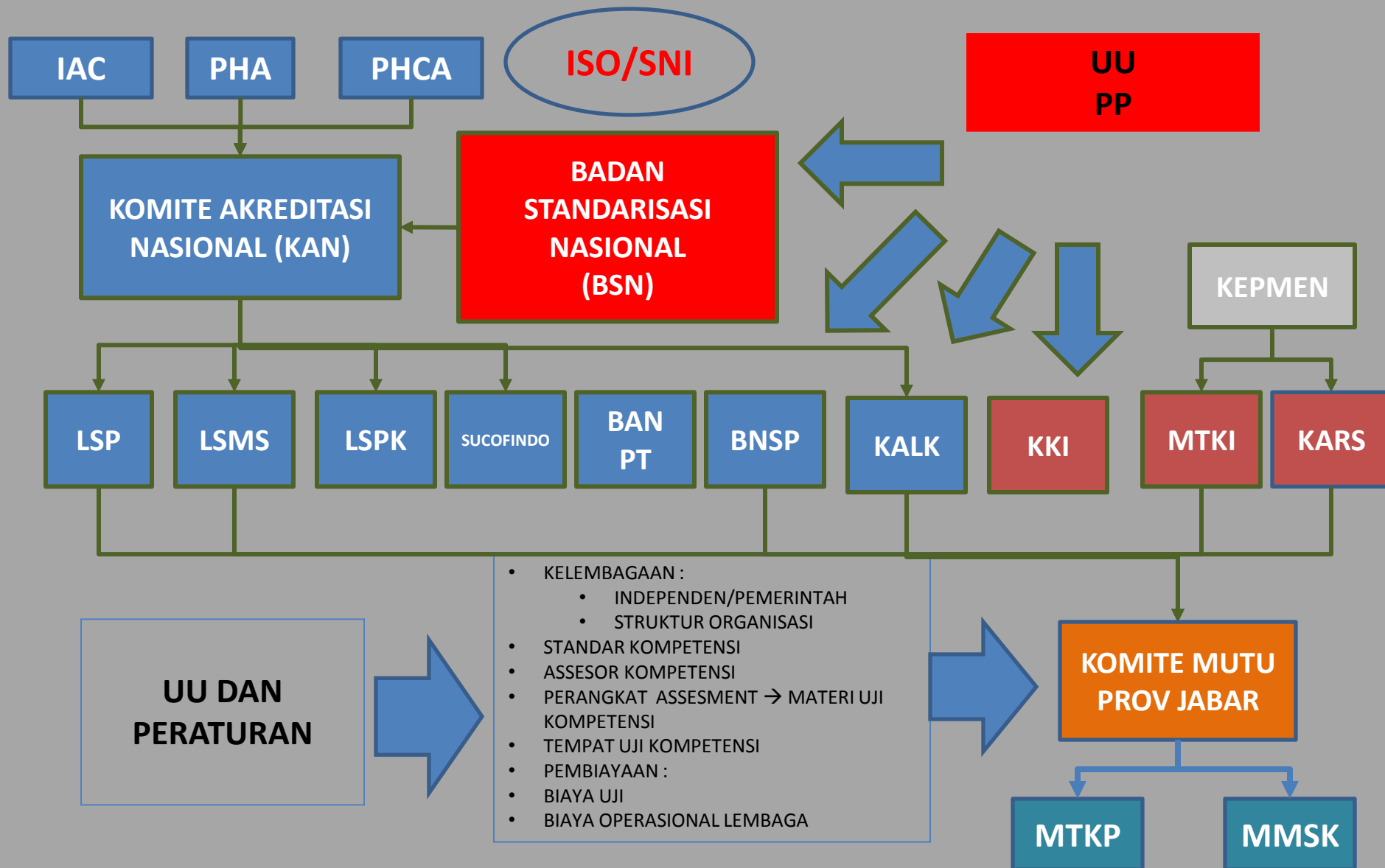
REGIONALISASI PELAYANAN KESEHATAN JAWA BARAT



SYSTEM RUJUKAN REGIONAL PELAYANAN KESEHATAN (*terstruktur*) DI PROVINSI JAWA BARAT



RANCANG BANGUN LEMBAGA SERTIFIKASI TENAGA DAN SARANA KESEHATAN (LSTSK) JAWA BARAT UTK PERLINDUNGAN MASY & ANTISIPASI GLOBALISASI



DASAR HUKUM

- UU no 36 Tahun 2009, Pasal 19 pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau.
- PP no 38 Tahun 2007 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi, khususnya bidang kesehatan. Pemerintah dalam hal ini kementrian kesehatan, Dinkes Provinsi maupun Dinas kesehatan Kabupaten Kota diharapkan menjadi lembaga regulasi ataupun pelaksana regulator yang mampu menciptakan regulasi yang mengacu perbaikan mutu secara berkelanjutan melalui pengembangan sistem regulasi pelayanan ditingkat lembaga atau wilayah.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/Menkes/Sk/X/2008 Tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

KEPMENKES RI

NOMOR 922/MENKES/SK/X/2008

URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI :

SUB BIDANG UPAYA KESEHATAN , SUB-SUB BIDANG UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan

A Registrasi Sarana kesehatan:

- 1 Memberikan rekomendasi registrasi rumah sakit
- 2 Melakukan registrasi labkes kelas pertama sarana radiologi diagnostik UTD Pembina
- 3 Monitoring evaluasi registrasi sarana kesehatan seluruh kabupaten di wilayah kerja provinsi
- 4 Pembinaan registrasi sarana kesehatan seluruh kabupaten di wilayah kerja provinsi.

B Akreditasi Sarana Kesehatan

- 1 Melaksanakan akreditasi Praktek mandiri tenaga medis dan keperawatan, praktek berkelompok tenaga medis dan keperawatan, rumah bersalin, klinik umum/ spesialis
- 2 Bimbingan dan pengawasan akreditasi sarkes seluruh kabupaten di wilayah kerja provinsi
- 3 Memberikan rekomendasi akreditasi sarana kesehatan
- 4 Monitoring dan evaluasi akreditasi sarkes seluruh kabupaten di wilayah kerja provinsi

C Sertifikasi Sarana Kesehatan

- 1 Memberikan rekomendasi permohonan sertifikasi penetapan/ peningkatan kelas RS & Labkes Tk Prov
- 2 Melakukan pengawasan di tingkat Provinsi

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 11 TAHUN 2010
TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN**

**BAB V
KEWENANGAN
Pasal 6**

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan kesehatan meliputi :

Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan;

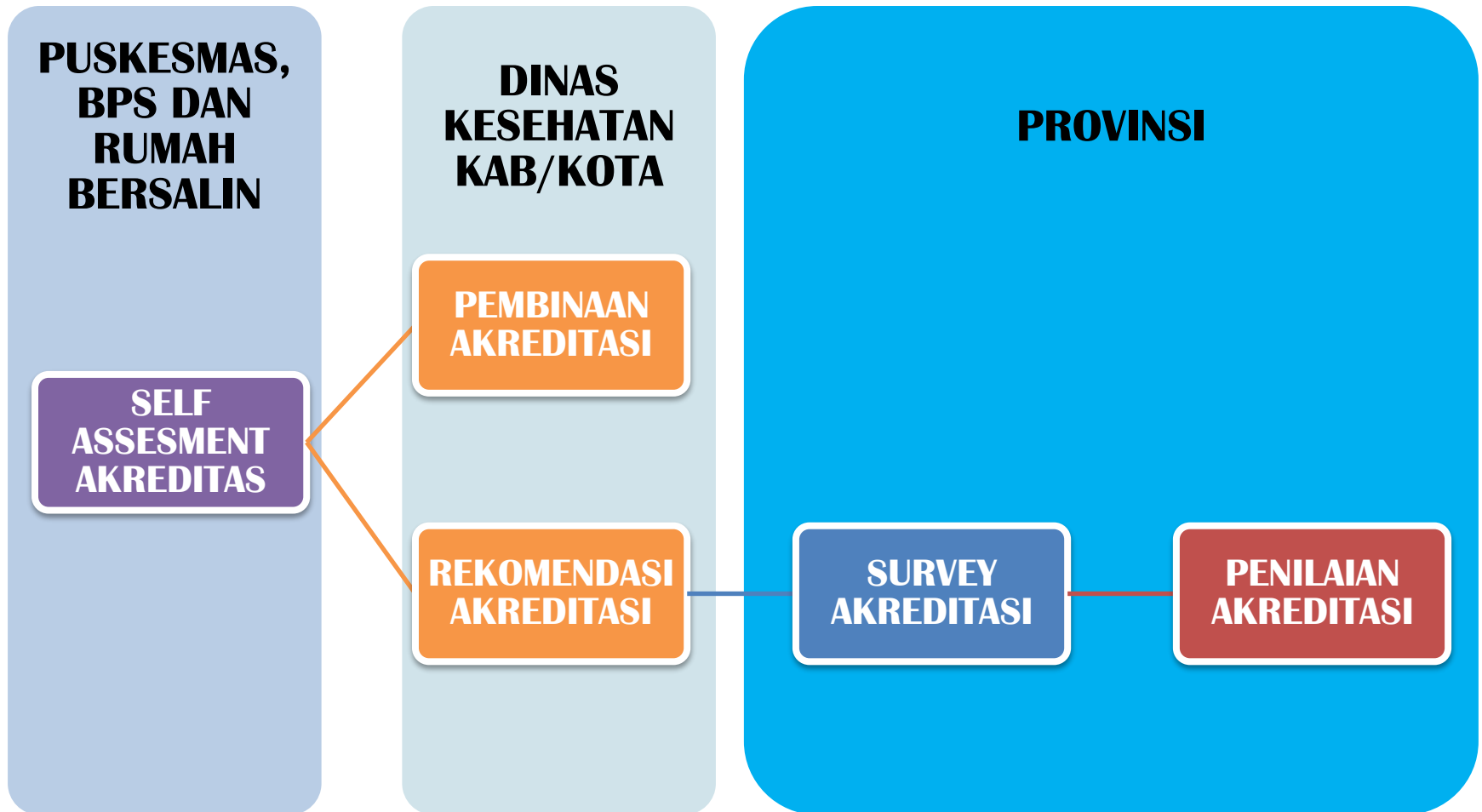
Pasal 27

- 1) Dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat penerima pelayanan kesehatan, serta kepastian hukum bagi pemberi pelayanan agar dapat tercapai mutu pelayanan yang setinggi-tingginya bagi seluruh masyarakat, Pemerintah Daerah menyusun regulasi kesehatan yang meliputi :
 - a. Registrasi;
 - b. Perijinan;
 - c. Sertifikasi; dan
 - d. Akreditasi.
- 2) Regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan pedoman berupa harmonisasi norma, standar prosedur dan kriteria serta jaminan kualitas dan arah kebijakan penyelenggaraan kesehatan di Daerah, sesuai kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

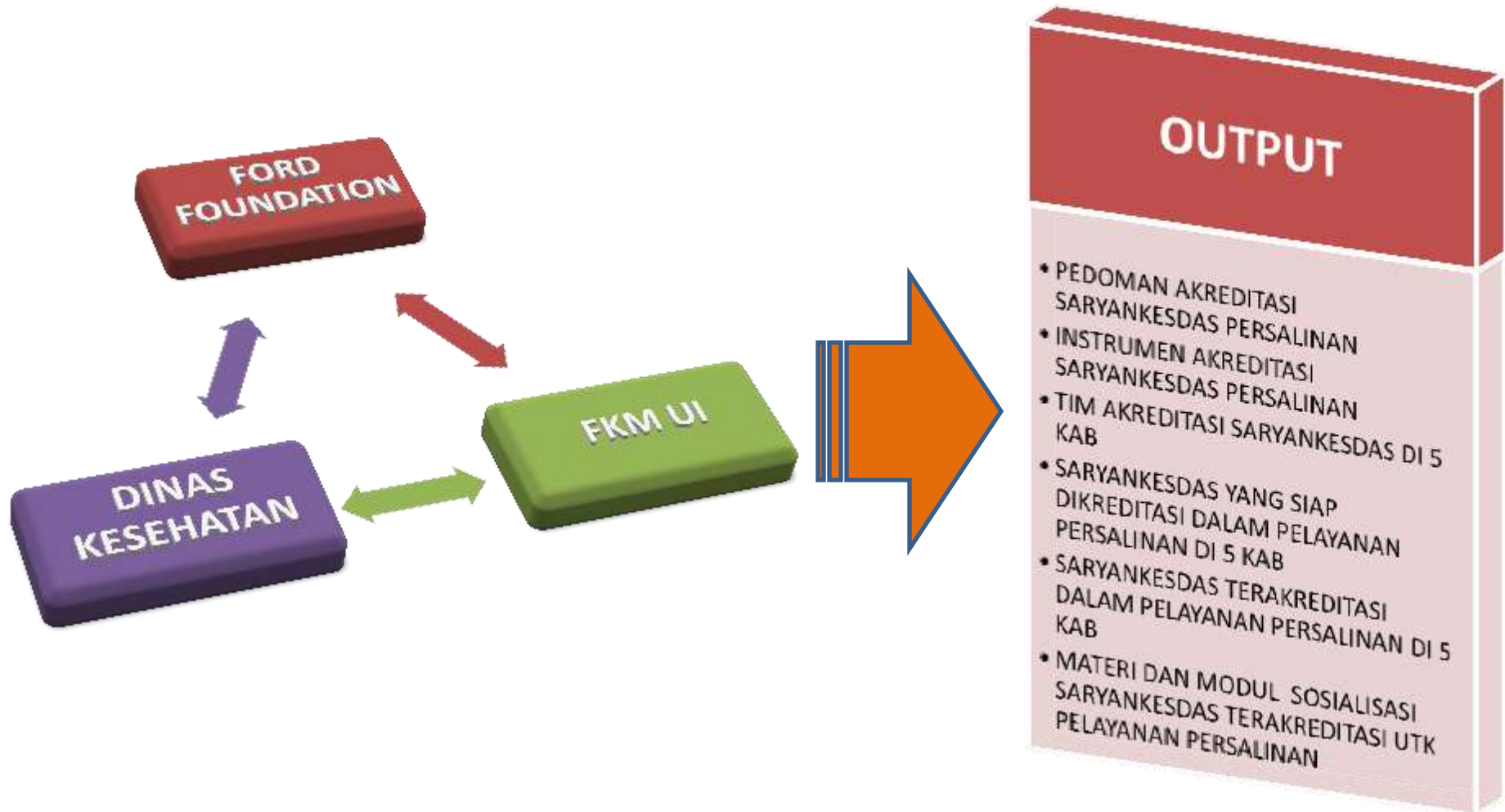
AKREDITASI

- Akreditasi adalah suatu pengakuan yang dilakukan oleh badan yang diakui, yang menyatakan bahwa lembaga pelayanan kesehatan telah memenuhi standar optimal yang telah ditetapkan dan diterapkan pada lembaga.
- Tujuan akreditasi adalah meningkatkan mutu pelayanan, memberikan jaminan, kepuasan dan perlindungan kepada masyarakat,

ALUR AKREDITASI YANKESDAS PROVINSI JAWA BARAT



KERJASAMA SOSIALISASI AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN DASAR DALAM PERSALINAN TAHUN 2009-2010



AKREDITASI PELAYANAN PERSALINAN

INPUT :

1. Sumber Daya manusia (SDM)

- Surveyor Provinsi (15 orang)
 - IBI
 - Lintas Program
 - Seksi Ditsarkes
- Surveyor Kabupaten (20 orang)
 - 4 orang Kab Cirebon
 - 4 orang Kab Ciamis
 - 4 orang Kab Subang
 - 4 orang Kab Garut
 - 4 orang Kab Sukabumi

2. Bahan

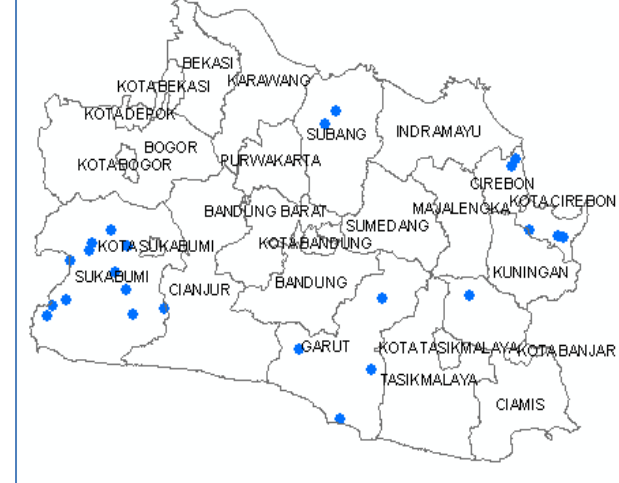
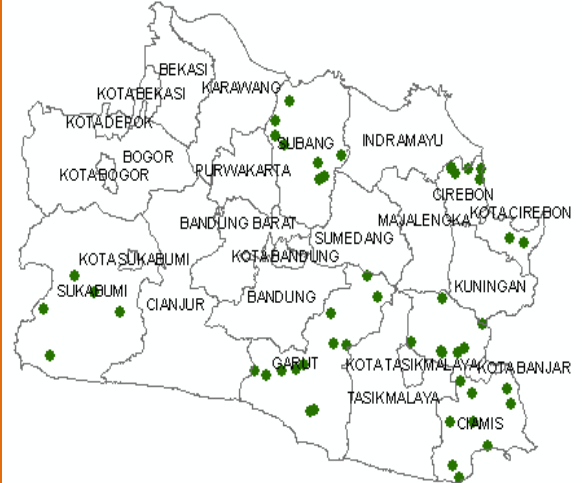
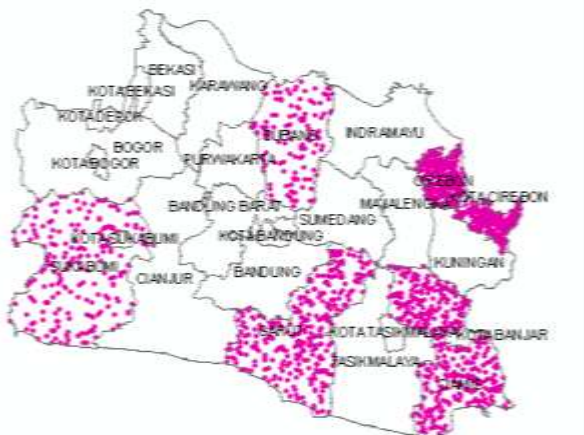
- Instrumen Akreditasi Persalinan
 - Standar 1 (Registrasi)
 - Standar 2 SDM (legal aspek, kualifikasi)
 - Standar 3 SPO
 - Standar 4 Sar-Pras
 - Standar 5 Rekam Medik
 - Standar 6 Alur Rujukan
- Standar Pelayanan Minimal Persalinan

SEBARAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR MITRA FORD FONDATION DI JAWA BARAT TAHUN 2010

BIDAN PRAKTEK SWASTA 1532 BUAH

PKM PONED 27 BUAH

RUMAH BERSALIN 24 BUAH



CAPAIAN AKREDITASI SARANA PERSALINAN NORMAL DI 5 KABUPATEN MITRA FORD FOUNDATION TAHUN 2011

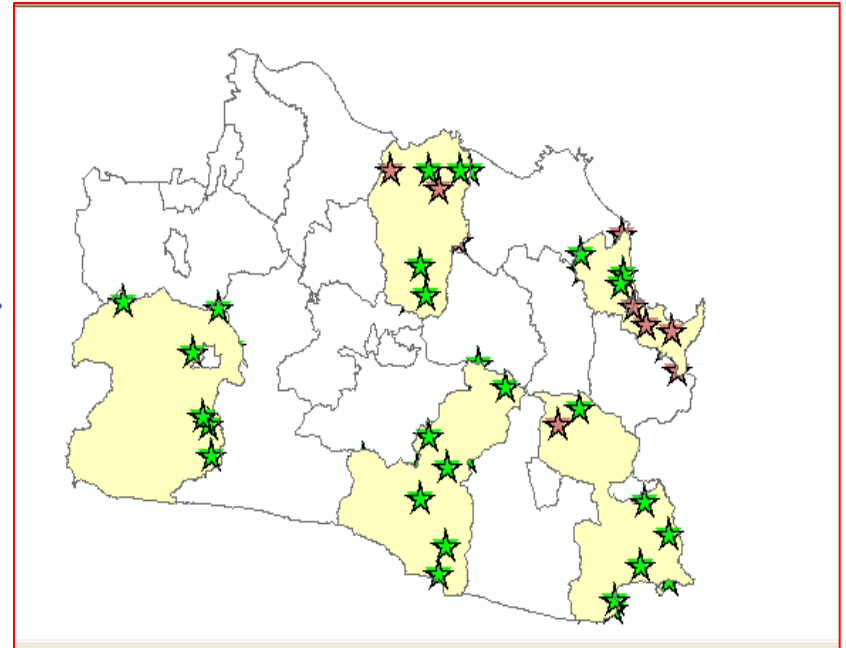
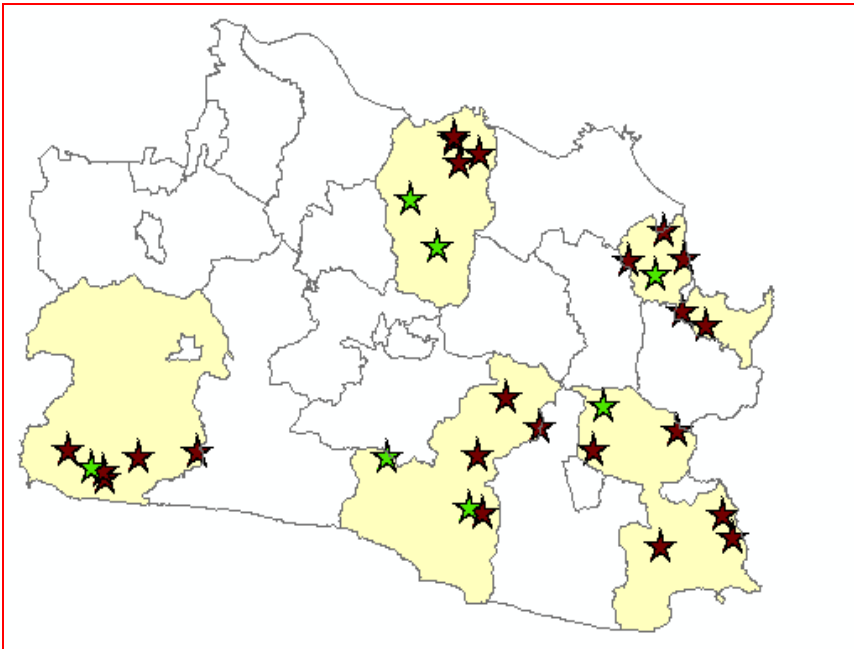
NO	KAB	JLH SARANA YG ADA	PONED	NON RI	RB	BPS	JLH	CAPAIAN						
								SELF ASSES DIBAGIKAN	SELF ASSES TERKUMPUL	PONED	NON RI	RB	BPS	JLH
1	Ciamis	424	6	10	1	30	47	424	400	6	5	1	8	20
2	Garut	321	6	13	-	50	69	321	320	6	8	-	6	20
3	Cirebon	540	4	20	2	45	71	540	400	4	5	2	9	20
4	Subang	170	7	4	2	5	28	170	155	7	4	1	5	20
5	Sukabumi	265	4	20	6	30	40	265	215	4	5	5	6	20

GAMBARAN HASIL PEMBINAAN ASUHAN PERSALINAN NORMAL SETELAH PENILAIAN AKREDITASI AWAL DI 5 KABUPATEN BINAAN FORD FOUNDATION TAHUN 2011

TAHAP PENILAIAN
SARANA TERAKREDITASI : 7 dari 30
sarana (23.3 %)



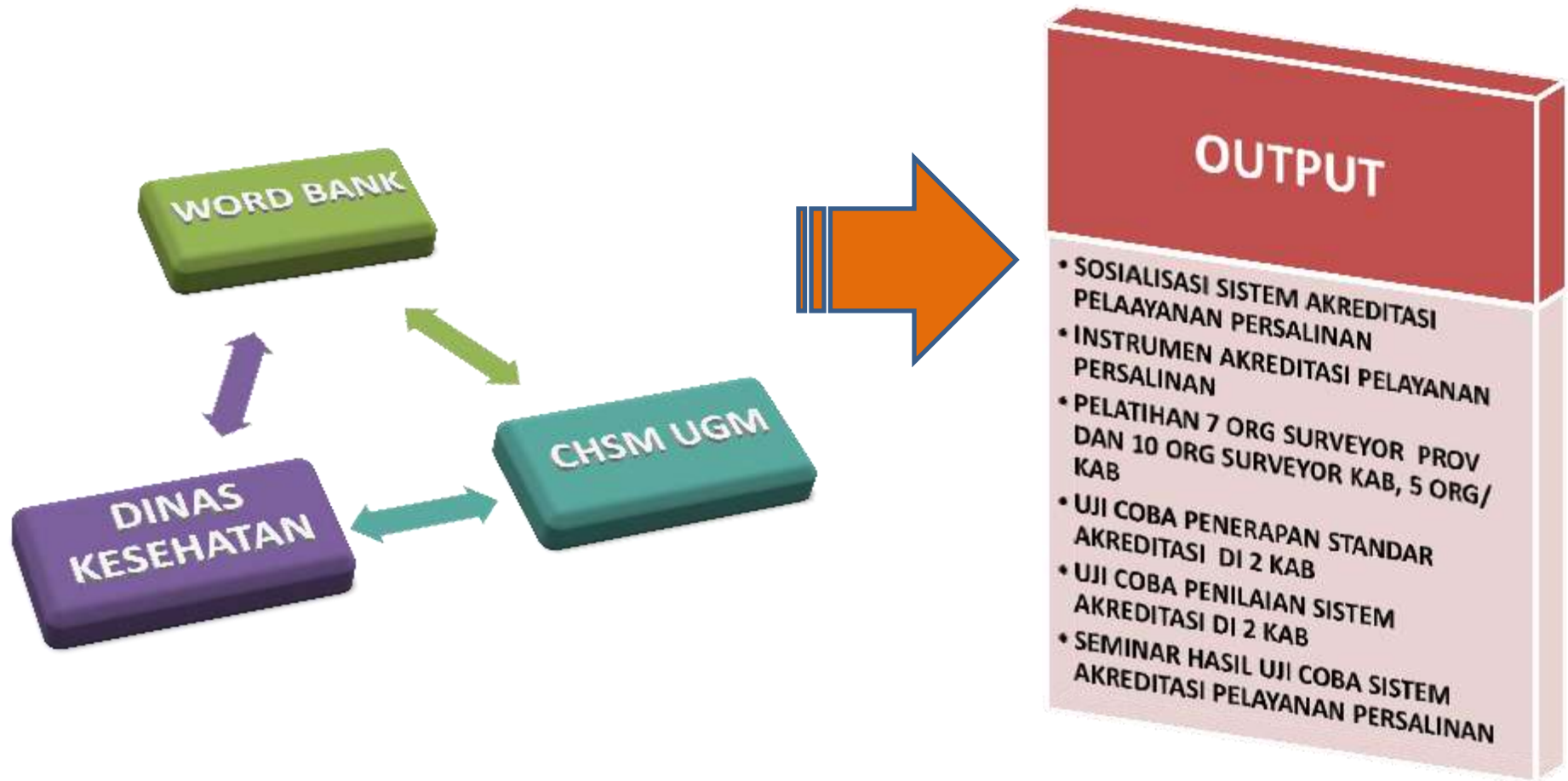
TAHAP PEMBINAAN
SARANA TERAKREDITASI MENJADI 24
dari 30 sarana (83.3 %)



 TERAKREDITASI

 TIDAK TERAKREDITASI

KERJASAMA SOSIALISASI SISTEM AKREDITASI PELAYANAN PERSALINAN TAHUN 2010-2011

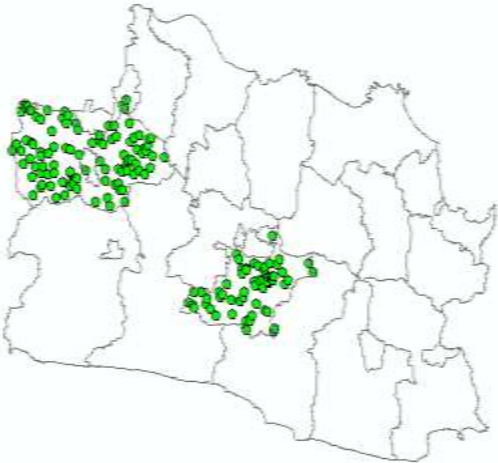


SEBARAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI KAB BANDUNG DAN KAB BOGOR

PUSKESMAS

KAB BOGOR : 101 PKM

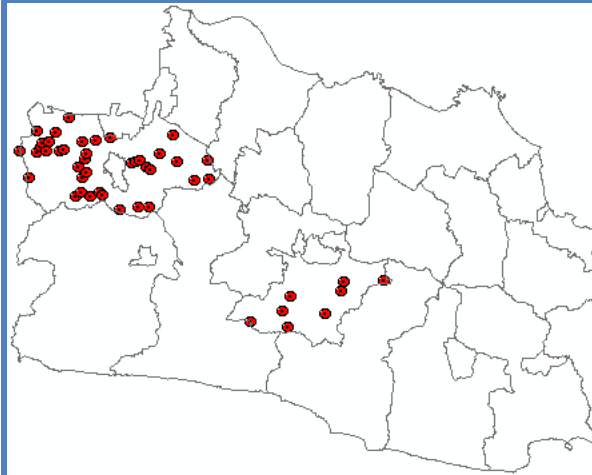
KAN BANDUNG : 61 PKM



RUMAH BERSALIN

KAB BOGOR : 39 RB

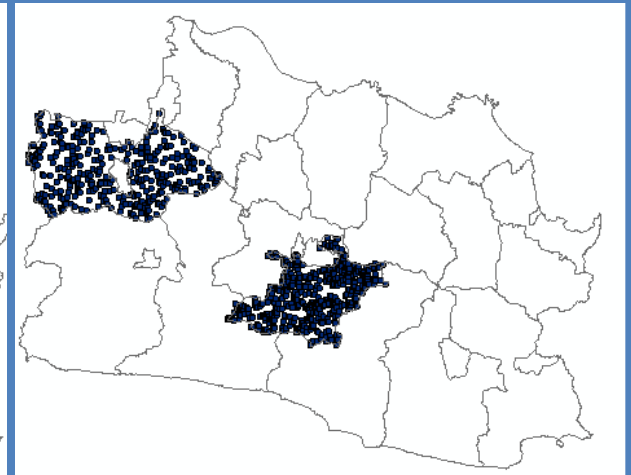
KAN BANDUNG : 8 RB



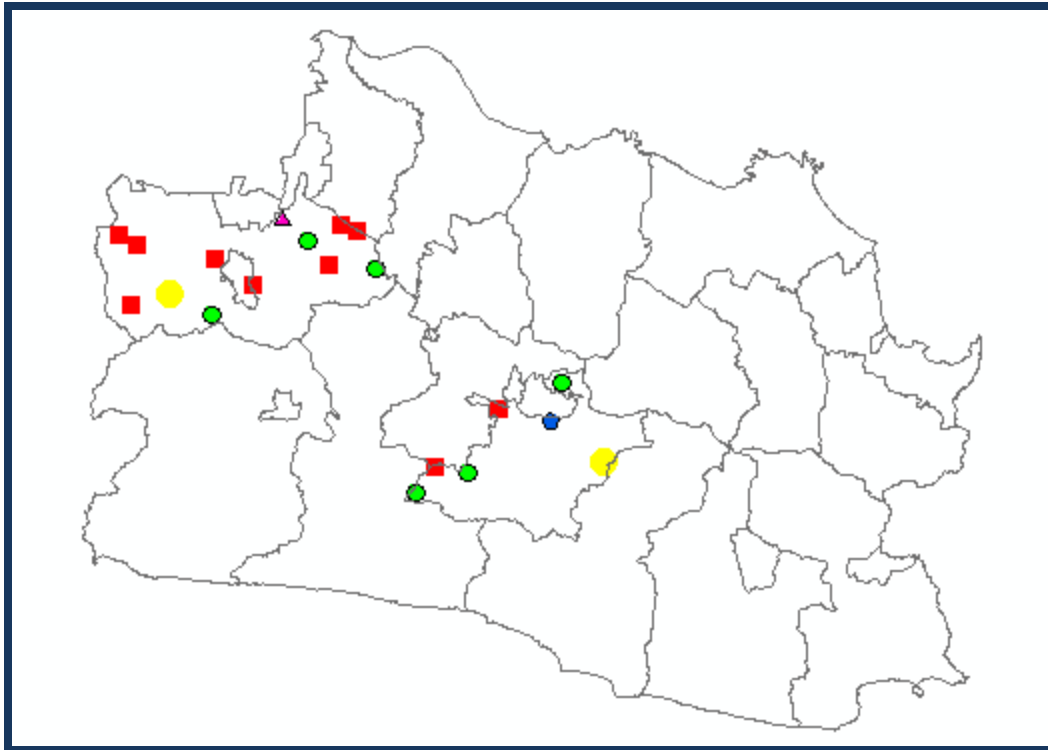
BIDAN PRAKTEK SWASTA

KAB BOGOR : 374 BPS

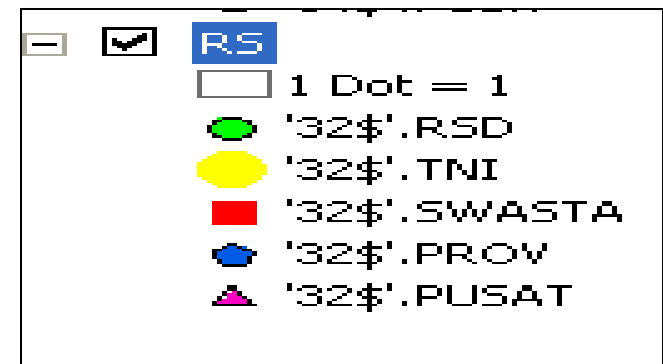
KAN BANDUNG : 470 BPS



GAMBARAN SARANA RUMAH SAKIT DI KAB BANDUNG DAN KAB BOGOR



	KAB BANDUNG	KAB BOGOR
RSUD	3	3
TNI	1	1
RPUSAT	0	1
PROVINSI	1	0
SWASTA	2	8



SARANA UJI COBA SISTIM AKREDITASI PELAYANAN PERSALINAN

No	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bogor
1	RSUD AL-Ihsan	RSU Leuwiliang Ciawi
2	RSUD Soreang	Puskesmas DTP Citereup
3	Puskesmas Pangalengan	Puskesmas Cilengsi
4	RB Norma Masitha	RB Endang
5	BPS Ety Rohayati	BPS Enap

HASIL ???

- **Perlu dikembangkan suatu sistem akreditasi pelayanan persalinan yang efektif** guna tercapainya pelayanan yang prima. Kegiatan yang akan dikembangkan di Propinsi Jawa barat adalah dengan menggabungkan sistem akreditasi dari Ford Foundation - FKUI dan CHSM FK UGM → maka dibuat Pergub Standar Akreditasi Persalinan pada Pelayanan Kesehatan Dasar.
- Membentuk suatu Tim mutu Dinkes Provinsi Jabar yaitu **Komite Mutu Pelayanan Kesehatan (LEMBAGA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN MUTU)**
- Sebagai langkah awal di bentuk **Tim Pengembang Badan Mutu Sarana pelayanan kesehatan**

TIM PENGEMBANG LEMBAGA SERTIFIKAS SISTEM MANAGEMENT MUTU SARANA PELAYANAN KESEHATAN

- ADALAH TIM YANG DIBENTUK OLEH SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI YANG ANGGOTANYA TERDIRI DARI ORGANISASI PROFESI, DINKES PROV, DINKES KAB KOTA, INSTITUSI PENDIDIKAN.
- MERUPAKAN CIKAL BAKAL UTNUK TERBENTUKNYA BADAN MUTU PROVINSI JAWA BARAT (LEMBAGA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN MUTU)

TUJUAN

- Tujuan Tim pengembang Badan mutu sarana pelayanan kesehatan adalah untuk meningkatkan kualitas sarana dan tenaga pelayanan kesehatan dengan cara mengembangkan kerja sama antara pemerintah dengan organisasi profesi maupun lembaga lain (Stake holder) dalam kegiatan akreditasi dan sertifikasi

LEMBAGA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN MUTU SARANA PELAYANAN KESEHATAN

- BERSIFAT INDEPENDEN ?
- ADALAH LEMBAGA YANG AKAN DI AKREDITASI OLEH KOMITE AKREDITASI NASIONAL
- DI AKUI SECARA INTERNASIONAL
- KELEMBAGAAN DI SYAHKAN OLEH : SK KEPALA DINAS/ SK GUBERNUR/ AKTE NOTARIS

RUANG LINGKUP

- MENETAPKAN STANDAR MUTU PELAYANAN KESEHATAN
- AKREDITASI SARANA
- SERTIFIKASI LEMBAGA

PROSES AKREDITASI OLEH KOMITE AKREDITASI NASIONAL

Penyusunan dokumen

Implementasi dokumen

Audit Internal & tinjauan manajemen

Pra Assesment oleh KAN

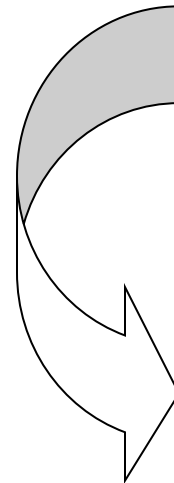
Aplikasi ke KAN untuk Lembaga sertifikasi

Assesment Awal oleh KAN

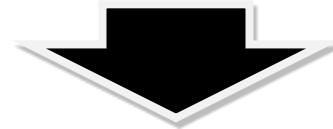
Witness (Penyaksian audit/menilai kompetensi auditor)

Rekomendasi kepada council KAN

Keputusan Akreditasi



**KOMITE
AKREDITASI
NASIONAL**



**LEMBAGA
SERTIFIKASI
SISTIM MANAJEMEN
MUTU**

TERIMA KASIH